



Strategi Kebijakan Peningkatan Peran Pengabdian Masyarakat STAIN Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Policy Strategy for Increasing the Role of Community Service at STAIN Majene in Community Economic Empowerment

Pakhri*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene – Sulawesi Barat

*Penulis Korespondensi: fachry_240685@yahoo.com

Riwayat Artikel

Received
17 – 6 – 2025

Revised
1 – 7 - 2025

Accepted
25 – 7 - 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Akuntabilitas;
Evaluasi Kebijakan;
Kolaborasi
Institusional;
Kualitas Pengabdian;
Pemberdayaan
Ekonomi;
Pengabdian
Masyarakat

Abstrak

Policy paper ini membahas strategi kebijakan peningkatan peran pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Latar belakang kajian ini adalah rendahnya efektivitas pengabdian masyarakat yang disebabkan oleh minimnya kolaborasi strategis antara STAIN Majene dan stakeholder ekonomi lokal, tidak adanya struktur kelembagaan khusus, serta absennya prosedur operasional formal. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, observasi lapangan, dan wawancara informal dengan pelaku usaha serta tokoh masyarakat. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan kerangka evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan unit khusus kemitraan eksternal di bawah P3M merupakan alternatif kebijakan paling strategis, dengan potensi mendorong transformasi kelembagaan dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam program pemberdayaan ekonomi. *Policy paper* ini merekomendasikan pembentukan unit tersebut dengan dukungan regulasi internal, struktur organisasi fungsional, sistem informasi digital, dan integrasi ke dalam rencana strategis kampus. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model pengabdian kolaboratif berbasis nilai Islam dan kebutuhan lokal, serta secara praktis menawarkan model kelembagaan yang adaptif dan inklusif bagi PTKIN di wilayah tertinggal. Dengan strategi ini, STAIN Majene berpeluang menjadi pelopor dalam praktik pengabdian masyarakat yang transformatif, berdampak, dan berkelanjutan.

Keywords

Accountability;
Policy Evaluation;
Institutional
Collaboration;
Service Quality;
Economic
Empowerment;

Abstract

This policy paper discusses strategies for enhancing the role of community service at STAIN Majene in local economic empowerment in Majene Regency, West Sulawesi. The background of this study is the low effectiveness of community service caused by the lack of strategic collaboration between STAIN Majene and local economic stakeholders, the absence of specific institutional structures, and the lack of formal operational procedures. This study uses a qualitative method with an

Community Service

evidence-based policy approach to descriptive analysis. Data were collected through literature studies, official document analysis, field observations, and informal interviews with business actors and community leaders. Primary and secondary data were then analyzed using the public policy evaluation framework according to William N. Dunn, which includes six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and precision. The analysis results show that the establishment of a special external partnership unit under P3M is the most strategic policy alternative, with the potential to drive institutional transformation and strengthen cross-sector collaboration in economic empowerment programs. This policy paper recommends the establishment of such a unit with support from internal regulations, functional organizational structure, digital information systems, and integration into the campus strategic plan. These findings contribute theoretically to the development of a collaborative service model based on Islamic values and local needs, and practically offer an adaptive and inclusive institutional model for PTKIN in underdeveloped regions. With this strategy, STAIN Majene has the opportunity to become a pioneer in transformative, impactful, and sustainable community service practices.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat (PkM) berperan strategis dalam menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dalam menyelaraskan keberadaan perguruan tinggi dengan dinamika dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, pengabdian memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai manifestasi dari nilai-nilai keislaman seperti keadilan sosial, tolong-menolong, dan tanggung jawab moral terhadap komunitas.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Secara geografis dan sosial, STAIN Majene memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penguatan ekonomi lokal. Kabupaten Majene merupakan wilayah dengan tantangan pembangunan yang signifikan, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan, yang didominasi oleh pelaku usaha mikro dan informal. Data BPS Kabupaten Majene (2023) menunjukkan bahwa 65% penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perdagangan kecil. Namun demikian, sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan akses ke pembiayaan, minimnya literasi keuangan, dan rendahnya keterhubungan dengan institusi pendukung seperti perguruan tinggi.

Dalam studi oleh Amalia dan Lestari (2020), sinergi antara perguruan tinggi dan pelaku ekonomi lokal terbukti dapat memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Sayangnya, di STAIN Majene belum ada kebijakan institusional yang secara khusus mendukung kolaborasi dengan stakeholder ekonomi lokal dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dijalankan selama ini cenderung bersifat insidental, tidak berbasis pada pemetaan kebutuhan masyarakat, dan kurang terdokumentasi secara sistematis. Ini menunjukkan adanya kelemahan pada sisi perencanaan strategis dan sistem manajemen program pengabdian.

Menurut Siregar dan Hamid (2021), insentif dan sistem penghargaan yang lemah bagi dosen merupakan salah satu penyebab rendahnya partisipasi dalam PkM. Beban kerja administratif yang tinggi juga mengalihkan fokus sivitas akademika dari kegiatan pengabdian yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai lembaga berbasis nilai Islam, STAIN Majene seharusnya memiliki keunggulan komparatif dalam membangun ekosistem pemberdayaan berbasis nilai keislaman seperti ekonomi syariah, zakat produktif, dan keuangan mikro Islam. Namun potensi ini belum dikelola secara strategis.

Ketidakterlibatan STAIN Majene dalam forum-forum pembangunan daerah seperti Musrenbang juga menjadi faktor lemahnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Padahal forum semacam ini dapat menjadi jembatan penting untuk menyelaraskan program kampus dengan prioritas pembangunan daerah. Menurut Rahman dan Surya (2022), budaya akademik yang kolaboratif perlu dibangun melalui proses transformasi nilai dan orientasi kelembagaan. Penguatan visi institusi dalam bidang pengabdian dapat dimulai dari perencanaan strategis yang jelas dan dukungan kebijakan internal.

Wibowo dan Cahyono (2021) mencatat bahwa ketiadaan SOP dan struktur kelembagaan yang menangani kemitraan eksternal menjadi hambatan utama dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di banyak kampus. Situasi ini juga dialami STAIN Majene, yang belum memiliki unit khusus kemitraan eksternal.

Minimnya nota kesepahaman aktif antara STAIN Majene dan lembaga ekonomi lokal juga menunjukkan lemahnya relasi strategis yang seharusnya dibangun oleh institusi pendidikan tinggi. Menurut data internal, hingga 2024 hanya ada 9 MoU aktif, sebagian besar tanpa implementasi program yang terukur. Kegiatan pengabdian masih dominan berbentuk penyuluhan satu arah, tanpa pendekatan pendampingan yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai tidak cukup untuk mentransformasi kapasitas ekonomi komunitas secara signifikan (Setyawati, 2020).

Dalam perspektif pemberdayaan komunitas, keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan program merupakan prinsip utama (Perkins & Zimmerman, 1995). Namun dalam praktiknya, sebagian besar program pengabdian masih bersifat top-down dan kurang menyerap aspirasi lokal. Model pengabdian berbasis riset juga belum menjadi praktik umum di STAIN Majene. Banyak kegiatan tidak memiliki dasar kajian yang kuat, sehingga kurang relevan dan berpotensi tidak berkelanjutan.

Kemampuan penggalangan dana eksternal juga masih rendah. Sebagian besar program pengabdian bergantung pada anggaran DIPA tanpa upaya yang signifikan untuk mengakses hibah atau pendanaan CSR. Ini menunjukkan kelemahan dalam kapasitas perencanaan dan jejaring eksternal kampus. Literasi teknologi dosen dan mahasiswa dalam mendukung PkM juga masih menjadi tantangan. Padahal, digitalisasi dapat menjadi alat penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengabdian, sebagaimana dicatat dalam kajian oleh Wiryanto (2017).

Belum adanya sistem informasi pengabdian kepada masyarakat yang terdigitalisasi menyebabkan lemahnya akuntabilitas, minimnya dokumentasi program, dan rendahnya ketersediaan data untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan. Dokumentasi yang lemah juga menyebabkan tidak adanya mekanisme pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*), padahal pengelolaan pengetahuan merupakan bagian penting dari manajemen mutu tridharma perguruan tinggi.

Penguatan ekonomi syariah sebagai niche STAIN Majene juga belum diintegrasikan secara sistemik ke dalam program pengabdian. Padahal pendekatan ini sangat sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Majene yang religius. Ketiadaan roadmap pengabdian masyarakat jangka panjang menyebabkan kegiatan bersifat reaktif dan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Menurut Brinkerhoff (2002), kemitraan strategis harus memiliki visi jangka panjang dan tujuan bersama.

Kultur kerja kolaboratif antar prodi juga belum terbentuk. Sebagian besar program pengabdian kepada masyarakat masih bersifat sektoral dan dilaksanakan sendiri oleh dosen tanpa melibatkan prodi lain, mahasiswa, atau mitra eksternal. Pelibatan mahasiswa dalam PkM masih terbatas pada kegiatan KKN atau tugas kuliah, tanpa skema integrasi yang kuat dengan kurikulum dan capaian pembelajaran. Dalam konteks implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), program pengabdian seharusnya dapat menjadi media pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa, namun hal ini belum optimal dimanfaatkan oleh STAIN Majene. Banyak prodi belum memiliki pemetaan mitra lokal yang dapat dijadikan basis kerja sama pengabdian. Padahal pemetaan ini penting untuk perencanaan program yang tepat sasaran dan berdampak.

Forum komunikasi antar pemangku kepentingan (kampus, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas) masih belum tersedia secara reguler. Akibatnya, tidak ada sinkronisasi agenda antar lembaga dan peluang kolaborasi sering terlewatkan. Menurut Morgan (2006), pembangunan kapasitas institusi memerlukan intervensi pada aspek sistem, struktur, dan sumber daya manusia. STAIN Majene belum memiliki kebijakan penguatan kapasitas yang menyeluruh dalam bidang pengabdian masyarakat.

Dalam banyak studi, keberhasilan program pengabdian ditentukan oleh adanya champion atau pemimpin perubahan di institusi (Nugroho, 2018). Di STAIN Majene, peran kepemimpinan strategis dalam pengabdian belum sepenuhnya terlihat. Ketiadaan sistem penghargaan berbasis kinerja pengabdian menyebabkan dosen tidak termotivasi untuk berinovasi atau memperluas jejaring kolaborasi. Hal ini menciptakan stagnasi dalam pendekatan PkM yang dikembangkan. Tidak adanya forum evaluasi dan refleksi berkala atas kegiatan PkM juga menjadi hambatan dalam proses perbaikan berkelanjutan. Evaluasi hanya dilakukan sebagai pelengkap laporan, bukan sebagai alat pengambilan keputusan strategis.

Kegiatan pengabdian belum dilihat sebagai bagian integral dari manajemen kinerja institusi. Indikator pengabdian masih terbatas pada output administratif, bukan pada outcome atau dampak sosial-ekonomi yang nyata. Menurut Putra et al. (2021), integrasi tridharma yang baik harus didukung oleh kebijakan internal, sistem insentif, serta kelembagaan yang memfasilitasi kerja kolaboratif. Tanpa itu, PkM akan terus berada di posisi marjinal dalam tata kelola kampus.

Dengan berbagai kelemahan tersebut, transformasi pengelolaan pengabdian masyarakat di STAIN Majene menjadi kebutuhan mendesak. Dibutuhkan strategi kebijakan yang tidak hanya menjawab tantangan struktural, tetapi juga membangun sistem yang mendorong inovasi dan keberlanjutan. Strategi tersebut harus mencakup pembentukan unit kelembagaan yang fokus pada kemitraan eksternal, penyusunan kebijakan operasional yang mengatur mekanisme kerja sama, serta pengembangan sistem informasi berbasis digital yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

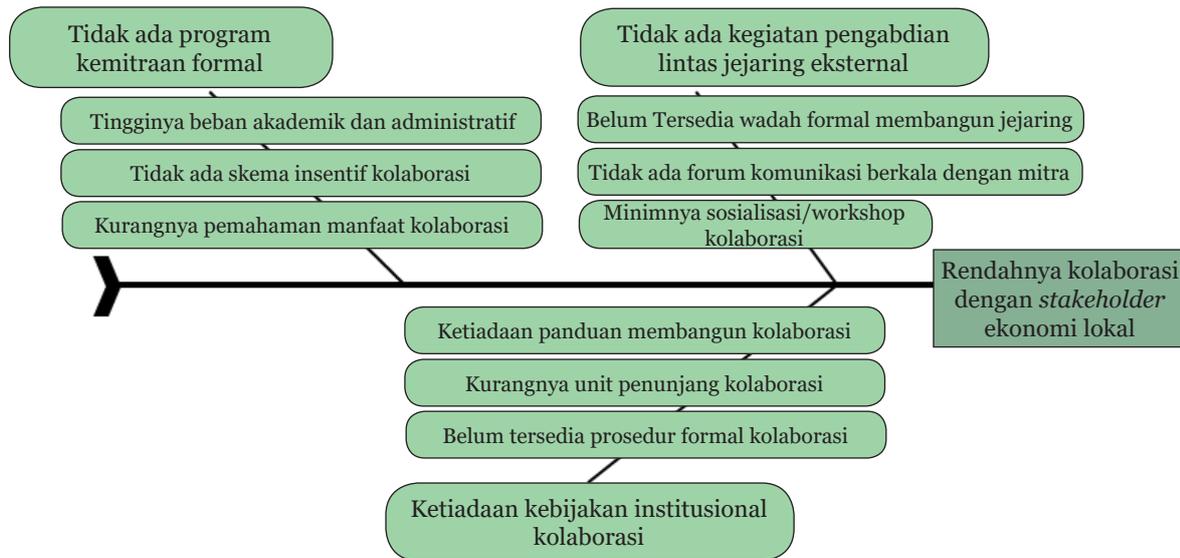
STAIN Majene memiliki posisi istimewa untuk memimpin program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keislaman dan kebutuhan lokal. Dengan strategi kelembagaan yang tepat, kampus ini dapat menjadi model PTKIN yang aktif membangun ekonomi komunitas secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan BUMDes, koperasi syariah, pesantren, dan lembaga zakat menjadi kunci untuk membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan relevan. Pendekatan ini juga akan memperluas dampak tridharma ke komunitas akar rumput yang selama ini belum tersentuh. Untuk itu, STAIN Majene perlu menjadikan pengabdian masyarakat sebagai salah satu indikator utama dalam perencanaan strategis, evaluasi kinerja institusi, dan reformasi kelembagaan, agar peran kampus dalam pembangunan lokal benar-benar terwujud.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Program Pengabdian Masyarakat belum fokus pada isu ekonomi lokal.
2. Rendahnya kolaborasi dengan stakeholder ekonomi lokal.
3. Kurangnya kompetensi dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi.
4. Model Pengabdian Masyarakat masih bersifat konvensional berupa pelatihan satu arah tanpa integrasi teknologi.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk diagram *fishbone* berikut ini:



Gambar 1. *Fishbone Diagram*

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan hasil analisis USG di atas, maka *problem statement* artikel kebijakan ini adalah rendahnya kolaborasi dengan *stakeholder* ekonomi lokal dikarenakan ketidadaan kebijakan institusi yang mendukung kolaborasi dalam menyediakan prosedur formal yang mengatur mekanisme kolaborasi, sehingga menyebabkan peran kampus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbatas.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan

Artikel kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan peran pengabdian masyarakat STAIN Majene, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Manfaat

Adapun manfaat dari kajian ini dapat dijabarkan ke dalam dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan literatur mengenai tata kelola pengabdian masyarakat di perguruan tinggi berbasis kolaborasi multi-pihak.
 - b. Menjadi rujukan dalam pengembangan model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat praktis
 - a. Menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan dampak pengabdian masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi lokal secara lebih sistematis dan terstandarisasi.
 - b. Memperkuat posisi STAIN Majene sebagai agen pemberdayaan sosial ekonomi di wilayah Sulawesi Barat melalui pengabdian yang berbasis kebutuhan dan potensi lokal.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Tridharma Perguruan Tinggi

Teori ini menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu fungsi utama perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pengabdian menjadi wahana implementasi pengetahuan untuk memecahkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.

2. Teori Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership Theory*)

Menurut Brinkerhoff (2002), kemitraan strategis adalah kolaborasi antarpihak yang memiliki tujuan bersama, saling memperkuat, dan bersifat jangka panjang.

3. Teori Pemberdayaan Komunitas (*Community Empowerment Theory*)

Menurut Perkins & Zimmerman (1995), pemberdayaan komunitas menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan penguatan kapasitas lokal. Hal ini penting agar program pengabdian tidak bersifat top-down, melainkan partisipatif dan berbasis kebutuhan riil. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perubahan sosial dan ekonomi.

4. Teori Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Menurut Morgan (2006), penguatan kapasitas mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, struktur kelembagaan, dan sistem yang memungkinkan organisasi untuk berfungsi efektif. Keterbatasan SDM dalam kolaborasi eksternal harus diatasi melalui pelatihan dan pembangunan sistem pendukung.

5. Teori Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance Theory*)

Menurut Ansell dan Gash (2008), governance kolaboratif adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktor publik dan privat secara bersama-sama, berbasis dialog dan konsensus. Model ini sesuai untuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Kerangka Konseptual

1. Pengabdian Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal

Konsep ini merujuk pada model pengabdian masyarakat yang secara khusus diarahkan untuk menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas lokal, seperti keterbatasan akses permodalan, lemahnya manajemen usaha mikro, rendahnya literasi keuangan, dan terbatasnya inovasi produk lokal. Pengabdian tidak lagi hanya berbentuk penyuluhan, tetapi harus diarahkan pada intervensi aplikatif dan pendampingan produktif, seperti pelatihan UMKM, pembentukan koperasi syariah, inkubasi bisnis lokal, dan fasilitasi akses pemasaran digital.

2. Kolaborasi Tridharma Berbasis Kebutuhan Nyata

Dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian harus beririsan langsung dengan pendidikan dan penelitian. Artinya, kegiatan pengabdian yang efektif seharusnya berbasis pada hasil kajian ilmiah yang berasal dari penelitian dosen/mahasiswa, dan dijadikan media pembelajaran praktik lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan desain integratif tridharma yang menempatkan pengabdian sebagai titik temu antara akademisi dan kebutuhan lapangan.

3. Kemitraan Multipihak untuk Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan ekonomi tidak dapat dilakukan secara unilateral. Diperlukan kemitraan dengan *stakeholder* lokal, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, BUMDes, lembaga zakat/infak, pelaku usaha lokal, dan komunitas masyarakat. Konsep kemitraan ini mencakup kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan, sehingga tercipta ekosistem pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penulisan *policy paper* ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode *policy research*, yang berorientasi pada pemecahan masalah kebijakan melalui penyusunan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*). Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi akar masalah rendahnya peran pengabdian masyarakat STAIN Majene dalam pemberdayaan ekonomi lokal, serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan secara kontekstual. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara informal dan observasi lapangan di beberapa wilayah di Kabupaten Majene, untuk menangkap persepsi dan kebutuhan pelaku usaha lokal serta tokoh masyarakat terhadap peran STAIN Majene. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti RPJMD Kabupaten Majene 2021–2026, data BPS Kabupaten Majene, dokumen kebijakan Kementerian Agama, peraturan perundang-undangan nasional, serta hasil publikasi jurnal yang relevan.

Alternatif kebijakan dirumuskan melalui proses sintesis informasi, studi literatur, dan penelaahan terhadap praktik-praktik baik (*best practices*) dari lembaga pendidikan ting-

gi lain. Setiap alternatif kemudian dievaluasi menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (*appropriateness*). Metodologi ini bersifat analitis-normatif, karena tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi normatif berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etis. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber data dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

STAIN Majene sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di wilayah Majene, Sulawesi Barat, memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan lokal, terutama melalui fungsi pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, potensi strategis ini belum terwujud secara optimal karena lemahnya sistem kemitraan eksternal dengan pelaku ekonomi lokal. Kolaborasi yang bersifat institusional, terencana, dan berkelanjutan masih sangat terbatas, sehingga kegiatan pengabdian cenderung sporadis dan tidak terdokumentasi secara sistemik.

Kabupaten Majene sendiri menghadapi tantangan serius dalam penguatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal dan usaha mikro. Menurut data BPS Kabupaten Majene (2023), 65% penduduk bekerja di sektor pertanian dan perdagangan kecil dengan persentase penduduk miskin sebesar 14.54%. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam ekosistem pembangunan yang seharusnya dapat diisi oleh lembaga pendidikan tinggi, termasuk STAIN Majene.

Kondisi geografis Kabupaten Majene yang terdiri atas kawasan pesisir, perbukitan, dan pedalaman turut memperumit upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaku usaha di daerah pesisir umumnya menggantungkan hidup pada perikanan tradisional yang belum tersentuh inovasi teknologi, sementara di daerah pedalaman, pertanian subsisten masih dominan tanpa keterhubungan rantai nilai yang kuat. STAIN Majene dapat memainkan peran sebagai penghubung antara potensi lokal dan dukungan akademik, teknologi, serta pasar melalui program pengabdian yang kontekstual.

Selain itu, dinamika demografis yang didominasi oleh kelompok usia produktif membuka peluang untuk pemberdayaan ekonomi berbasis generasi muda. Namun, rendahnya akses pelatihan dan pendampingan dari institusi pendidikan tinggi menjadi hambatan dalam mengembangkan potensi pemuda desa menjadi wirausahawan sosial. STAIN Majene dapat menyasar kelompok pemuda ini sebagai mitra strategis dalam setiap intervensi pengabdian masyarakat. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro. Di era transformasi digital, kemampuan menggunakan teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan keuangan atau pemasaran daring masih minim. STAIN Majene dapat merancang program pelatihan digitalisasi UMKM berbasis desa melalui kolaborasi dengan Dinas Kominfo atau mitra swasta.

Secara internal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kampus masih diposisikan sebatas pemenuhan administratif dalam Beban Kinerja Dosen (BKD). Model pengabdian yang dikembangkan lebih bersifat berbasis laporan daripada berbasis kebutuhan masyarakat. Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan sistem pemetaan potensi dan kebutuhan mitra lokal secara menyeluruh. Artinya, STAIN Majene belum memiliki sistem intelijen sosial-ekonomi yang bisa digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian secara objektif. Kultur birokrasi yang masih kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan turut menjadi penghambat dinamika kolaborasi eksternal. Sebagian dosen melihat kegiatan pengabdian sebagai beban administratif semata, bukan sebagai sarana transformasi sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya membangun kultur akademik yang progresif dan terbuka terhadap sinergi lintas sektor. Kelembagaan pengabdian juga masih terpusat pada P3M tanpa unit pelaksana teknis yang khusus menangani kemitraan. Padahal, beban kerja P3M cukup kompleks karena mencakup penelitian dan publikasi ilmiah. Model kelembagaan seperti Lembaga Inovasi dan Kemitraan Strategis perlu dikembangkan agar fungsi pengabdian tidak hanya administratif, tetapi juga visioner.

Dalam aspek pelaporan, belum ada sistem terpadu yang mampu mendokumentasikan kegiatan pengabdian secara digital. Banyak laporan kegiatan disimpan dalam bentuk hard copy dan tersebar di berbagai unit. Hal ini menyulitkan proses akreditasi, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Dibutuhkan sistem informasi terpadu yang mampu menyimpan, mengolah, dan menyajikan data pengabdian secara real-time.

Data internal tahun 2024 menunjukkan hanya 1.43% dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat berbasis mitra. Mahasiswa pun sebagian besar terlibat secara insidental, seperti dalam KKN atau MBKM. Hal ini menunjukkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam jejaring eksternal masih sangat rendah. Dampaknya, akses terhadap sumber pendanaan eksternal sangat terbatas dan masih bergantung pada anggaran DIPA.

Tabel 1. Perkembangan Program PkM STAIN Majene dari Tahun 2022 s.d 2024

Tahun	Kegiatan PkM dengan Mitra	Dosen Terlibat PkM Kolaboratif	Mahasiswa Terlibat
2022	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan moderasi beragama di ruang digital berbasis nilai lokal malaqbiq bagi siswa madrasah dan pondok pesantren Sulawesi Barat Implementasi pendekatan abcd dalam pendampingan pengembangan digitalisasi situs makam penyiar Islam di Kecamatan Pamboang Pendampingan guru madrasah banua sendana untuk mengembangkan kompetensi pedagogik melalui implementasi <i>brain based learning</i> 	8 Orang	-
2023	Pendampingan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tammeroddo berbasis <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD) untuk memenuhi instrument akreditasi satuan pendidikan 2020	3 Orang	-
2024	Penjangkauan spirit PTKIN pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri di Sulawesi Barat berbasis lembaga pendidikan	1 Orang	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat dari tahun 2022 hingga 2024. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan juga belum fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta keterlibat-

an dosen-mahasiswa masih sangat rendah, Sehingga penguatan kelembagaan dan insentif masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, tidak adanya database mitra kolaboratif di tingkat program studi membuat inisiatif kerja sama menjadi sangat tergantung pada relasi pribadi dosen. Hal ini menyulitkan pengembangan jejaring secara institusional. Maka diperlukan pemetaan stakeholder strategis secara komprehensif yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika sebagai referensi dalam perencanaan program pengabdian. Kelemahan dalam koordinasi antar-lembaga juga menjadi hambatan. Misalnya, belum adanya forum rutin antara STAIN Majene dengan pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, dan komunitas masyarakat sipil membuat pertukaran informasi dan penyelarasan program sulit terjadi. Padahal, sinergi lintas aktor adalah kunci dari keberhasilan program pengabdian yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Kebijakan internal harus segera diubah. Di bawah koordinasi P3M, kampus harus membentuk unit kemitraan eksternal. Unit ini bertanggung jawab untuk membuat prosedur operasi standar (SOP), sistem informasi kemitraan, dan melakukan evaluasi kinerja mitra secara berkala. Selain itu, profil ekonomi Kabupaten Majene harus dibuat dengan data sektoral. Menurut BPS Majene (2023) kebanyakan pelaku usaha adalah usaha mikro dan kecil di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri rumah tangga.

Keunggulan nilai religius seperti nilai *sipakatawa* dan *assamaturu* menjadi modal sosial penting. Namun pendekatan teknokratis perlu disandingkan dengan pendekatan humanistik dan inklusif. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Forum Komunikasi Kemitraan Eksternal yang melibatkan pelaku usaha, LKM syariah, dan komunitas lokal. Salah satu inovasi penting adalah integrasi program pengabdian dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa dapat diberdayakan untuk merancang dan mengimplementasikan program pengabdian sebagai bagian dari tugas akhir, magang, atau proyek berbasis MBKM. Hal ini akan menciptakan keterlibatan yang lebih bermakna dan meningkatkan kualitas luaran program.

STAIN Majene juga dapat mengadopsi model *learning village* atau desa mitra sebagai laboratorium sosial. Melalui pendekatan ini, satu desa menjadi lokasi intervensi berkelanjutan dari berbagai program studi. Ini memungkinkan pendekatan interdisipliner yang menyeluruh terhadap tantangan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Inovasi lainnya adalah lomba ide inovatif pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi. Melalui kompetisi ini, dosen dan mahasiswa didorong untuk merancang program yang kreatif, solutif, dan kontekstual. Pemenangnya dapat diberikan pendanaan internal dan dukungan teknis dari unit kemitraan eksternal untuk implementasi

Digitalisasi sistem kemitraan eksternal menjadi kebutuhan mendesak. STAIN Majene perlu membangun Sistem Informasi Pengabdian dan Kemitraan Eksternal (SIPKE) untuk mencatat, mempublikasikan, dan mengevaluasi kerja sama. Platform ini akan meningkatkan transparansi dan membuka peluang kolaborasi lintas daerah dan internasional. SIPKE dapat dikembangkan tidak hanya sebagai sistem pelaporan internal, tetapi juga sebagai dashboard publik yang menampilkan capaian pengabdian, daftar mitra aktif, serta testimoni

dampak program dari masyarakat. Hal ini akan membangun kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan lebih luas dari stakeholder eksternal.

Kampus juga perlu membangun basis data mikro sosial-ekonomi berbasis riset aksi. Sistem pendataan ini harus terintegrasi dengan kegiatan dosen dan mahasiswa agar dapat mendukung perencanaan program berbasis bukti (evidence-based programming). Platform digital ini dapat pula difungsikan sebagai marketplace kolaborasi, di mana masyarakat atau lembaga mitra dapat mengusulkan program kolaboratif kepada kampus. Pendekatan ini akan membalik pola *top-down* menjadi *bottom-up* dan mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam mendesain kegiatan pengabdian.

STAIN Majene dapat memainkan peran dalam distribusi zakat produktif dan dana sosial keagamaan kepada pelaku usaha mikro, melalui kerja sama dengan Baznas, LAZ, dan Dinsos. Model inkubator usaha mikro syariah yang terintegrasi (pelatihan, pendanaan mikro, legalitas, akses pasar) dapat dikembangkan bersama pesantren, koperasi syariah, dan komunitas masjid. Kampus juga dapat menyusun klaster pemberdayaan seperti “Klaster UMKM Syariah” atau “Klaster Wirausaha Santri”, melibatkan prodi dan pendampingan intensif oleh dosen dan mahasiswa.

Masjid dan pesantren di Kabupaten Majene memiliki potensi sebagai pusat ekonomi berbasis keislaman. STAIN Majene dapat membentuk jejaring Masjidpreneur dan Pesantrenpreneur yang mendukung transformasi lembaga keagamaan menjadi pusat inovasi dan kemandirian ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal juga memerlukan penguatan literasi keuangan berbasis nilai Islam. Kampus dapat menyelenggarakan pelatihan audit syariah, pengelolaan dana sosial, dan kewirausahaan halal kepada pelaku usaha dan aparat desa untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga ekonomi desa. Model pembiayaan mikro berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan dapat disosialisasikan dalam skema kolaborasi pengabdian masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi STAIN Majene sebagai kampus berbasis nilai Islam yang relevan dengan konteks lokal.

Penguatan kelembagaan harus disertai dengan kebijakan insentif dosen-mahasiswa, penyusunan SOP pengabdian kolaboratif, dan integrasi dalam dokumen strategis seperti Renstra dan IKU. Selain itu, dibutuhkan sistem post-engagement monitoring dan Tim Evaluasi Kemitraan lintas prodi untuk mengukur keberhasilan jangka panjang. Sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system) dan Kode Etik Kemitraan juga penting dikembangkan. Selain mendukung akuntabilitas, langkah ini akan menjamin keberlanjutan kolaborasi meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Evaluasi kinerja program pengabdian perlu didasarkan pada indikator capaian sosial-ekonomi, bukan sekadar output administratif. Kampus dapat menggunakan instrumen seperti community scorecard atau survei dampak untuk mengukur perubahan perilaku dan kesejahteraan mitra binaan. Tim evaluasi lintas prodi yang dibentuk dapat bertugas melakukan asesmen berkala ke lapangan, menyusun laporan kinerja mitra, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Hasil evaluasi ini juga dapat menjadi bagian dari sistem penghargaan bagi dosen dan mahasiswa yang aktif.

Dalam jangka panjang, STAIN Majene dapat membentuk Center for Community and Economic Empowerment (CCEE) dan Policy Innovation Lab sebagai wadah inovasi program dan kebijakan berbasis kolaborasi. Kehadiran lembaga ini akan memperkuat posisi kampus sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis nilai Islam.

Analisis Kebijakan

Kebijakan penguatan peran pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene dalam pemberdayaan ekonomi lokal memerlukan analisis yang komprehensif. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah rendahnya kolaborasi institusional antara STAIN Majene dan stakeholder ekonomi lokal, yang berdampak pada minimnya efektivitas program pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kapasitas ekonomi komunitas. Informasi ini dikonfirmasi oleh fakta bahwa hanya sebagian kecil kegiatan PkM yang melibatkan mitra eksternal secara sistemik, serta rendahnya jumlah nota kesepahaman aktif yang ditindaklanjuti menjadi program kolaboratif (Putra et al., 2021).

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong sinergi antara kampus dan pelaku ekonomi lokal melalui pembentukan sistem kelembagaan yang mendukung kolaborasi strategis, terstruktur, dan berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan mandat dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengamanatkan integrasi tridharma secara seimbang dan berbasis pada kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2012).

Kebijakan penguatan peran pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene dalam pemberdayaan ekonomi lokal memiliki relevansi strategis terhadap berbagai kerangka regulasi nasional di bidang pendidikan tinggi dan pembangunan masyarakat.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjadi dasar hukum utama yang mengatur bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 1 ayat (9) mendefinisikan pengabdian kepada masyarakat sebagai aktivitas sivitas akademika dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) mengharuskan setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan tridharma secara seimbang dan terintegrasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012).
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menegaskan bahwa kegiatan pengabdian harus berbasis pada kebutuhan masyarakat, melibatkan mitra strategis, serta menghasilkan luaran yang terukur secara sistematis. Peraturan Menteri ini memberikan kerangka kerja normatif bahwa kegiatan PkM wajib dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2015). Hal ini sejalan dengan fokus utama dari kebijakan pembentukan unit kemitraan eksternal di STAIN Majene yang bertujuan menciptakan sistem kelembagaan untuk mendukung kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan entitas desa dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat. Regulasi ini membuka ruang legal bagi kampus seperti STAIN Majene untuk berperan aktif dalam memberdayakan desa melalui kemitraan dengan BUMDes, koperasi desa, dan kelompok masyarakat sipil. Inisiatif kampus untuk menyusun SOP kemitraan dan membentuk unit khusus dalam kerangka pemberdayaan komunitas menjadi sangat relevan dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).
4. Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020–2024, menekankan pentingnya transformasi kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) dalam mendorong kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional melalui penguatan tridharma, khususnya pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan komunitas. Dengan demikian, pembentukan unit kemitraan eksternal STAIN Majene selaras dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Agama, yakni penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi sosial, dan peningkatan kontribusi institusi keagamaan terhadap isu-isu pembangunan nasional (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).
5. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, di mana salah satu indikator penting yang ditetapkan adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam aktivitas di luar kampus bersama mitra strategis dari sektor masyarakat dan industri. Dengan membentuk unit kemitraan eksternal, STAIN Majene memperkuat capaian IKU, meningkatkan integrasi antara pengajaran, riset, dan pengabdian, serta mendorong kolaborasi nyata yang berbasis kebutuhan lokal (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021).
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014, yang menekankan beberapa prinsip utama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan. Pasal 12 secara spesifik menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip:
 - a. Partisipatoris (*participatory*):

Prinsip ini menekankan pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek dalam suatu program, mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, hingga diseminasi. Ini berarti program PkM tidak bersifat *top-down* (dari atas ke bawah), melainkan melibatkan masyarakat secara penuh agar merasa memiliki (*sense of belonging*) dan bertanggung jawab atas keberlanjutan program.
 - b. Pemberdayaan (*empowerment*):

Pengabdian masyarakat harus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah mereka sendiri. Ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan mengambil keputusan.

c. Inklusif (*inclusive*):

Prinsip inklusif berarti program PkM harus menjangkau dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan, minoritas, perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Program harus dirancang untuk mengakomodasi berbagai latar belakang dan kebutuhan.

d. Kesetaraan (*equality/equity*):

Prinsip ini menekankan hubungan setara dan saling menghargai antara pihak perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa) dengan masyarakat mitra. Tidak ada dominasi atau superioritas dari salah satu pihak. Kemitraan harus didasarkan pada rasa saling menghormati, pemahaman budaya lokal, dan pengakuan terhadap pengetahuan serta pengalaman masyarakat.

Pada tataran implementatif, kebijakan pengabdian kepada masyarakat ini masih menghadapi sejumlah kelemahan yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa kendala pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di antaranya:

1. Masih bersifat administratif;
2. Insidental;
3. Tidak terdokumentasi dengan baik;
4. Belum didukung oleh struktur kelembagaan maupun sistem operasional yang memadai;
5. Minimnya jumlah MoU aktif dengan mitra ekonomi lokal; dan
6. Rendahnya partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kolaboratif.

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat regulasi dan praktik aktual di lapangan. Analisis terhadap efektivitas kebijakan pengabdian yang telah berjalan menunjukkan bahwa kebijakan sebelumnya belum mampu menjawab akar persoalan rendahnya kolaborasi dengan stakeholder eksternal. Ketiadaan struktur pengelola yang khusus, tidak adanya dokumen operasional seperti SOP dan panduan kerja sama, serta belum adanya sistem pemetaan mitra yang berbasis data menyebabkan kegiatan pengabdian bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan kebijakan yang baru perlu mengatasi secara langsung titik-titik lemah tersebut dengan cara membentuk unit kelembagaan yang memiliki fungsi khusus, sumber daya manusia yang terlatih, dan kerangka kerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan pelaporan institusional. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan memberikan tiga dampak utama, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pendekatan syariah,
2. Penguatan reputasi STAIN Majene sebagai kampus pengabdian,
3. Sinergi tridharma yang lebih terintegrasi.”

Nilai-nilai utama yang mendasari kebijakan ini adalah partisipasi, keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks STAIN Majene sebagai PTKIN, nilai-nilai keislaman seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan etis dalam

setiap bentuk intervensi kebijakan. Kebijakan ini juga memperhatikan prinsip inklusivitas dengan memastikan bahwa program pengabdian menasar kelompok ekonomi kecil dan menengah, serta membuka ruang partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Evaluasi atas nilai dan asumsi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga bermakna secara sosial dan berkelanjutan secara kelembagaan.

Namun demikian, beberapa konsekuensi kebijakan perlu diantisipasi. Proses birokrasi dalam pembentukan unit baru, resistensi budaya kerja sivitas akademika, dan kemungkinan tumpang tindih fungsi kelembagaan bisa menjadi hambatan awal. Jika tidak diikuti dengan sistem monitoring dan pelaporan yang kuat, maka efektivitas kebijakan akan menurun. Untuk mengatasi hal ini, dokumen kebijakan perlu dilengkapi dengan SOP kolaborasi, mekanisme pelaporan berbasis kinerja, dan integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (Pratama & Wijaya, 2018).

Dari aspek sosial, kebijakan penguatan pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene sangat relevan dalam menjawab permasalahan rendahnya akses pendidikan, keterampilan, dan informasi bagi kelompok rentan di Kabupaten Majene. Berdasarkan data Bappeda Majene (2023), terdapat ketimpangan yang cukup tinggi dalam akses pelatihan kewirausahaan antara pelaku usaha di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kampus, sebagai lembaga berpengetahuan, memiliki peran strategis untuk memperkecil ketimpangan ini melalui program berbasis masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan pengabdian juga berdampak positif terhadap penguatan modal sosial. Dalam pendekatan sosial, interaksi antara sivitas akademika dan masyarakat mendorong terbentuknya nilai kebersamaan, kepercayaan, dan solidaritas lintas generasi dan sektor. Menurut Putnam (2000), modal sosial yang kuat merupakan fondasi bagi pembangunan komunitas yang resilien dan adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi. Kebijakan ini dapat menjadi instrumen penguatan modal sosial melalui kegiatan pelatihan, forum komunikasi, dan program kolaboratif lintas institusi.

Secara ekonomi, kebijakan ini dapat menjadi pengungkit untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku usaha mikro dan kecil di Majene. Dengan pendekatan kolaboratif, kampus dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pelatihan literasi keuangan syariah, pemasaran digital, manajemen keuangan usaha, serta fasilitasi akses pembiayaan syariah dari lembaga keuangan mikro. Hal ini sangat sejalan dengan program prioritas nasional dalam penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.

Dampak ekonomi lainnya adalah terbukanya peluang usaha baru melalui kegiatan inkubasi bisnis sosial dan ekonomi kreatif berbasis lokal. STAIN Majene dapat menggandeng mitra usaha dan koperasi lokal untuk membentuk inkubator komunitas, yang tidak hanya mendampingi pelaku usaha dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga membangun jejaring pasar dan kemitraan lintas sektor. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.

Kebijakan ini juga akan memperkuat posisi STAIN Majene dalam ekosistem kewirausahaan sosial yang berbasis nilai Islam. Pendekatan ekonomi yang dijalankan bukan semata untuk

mengejar profit, tetapi untuk menciptakan kebermanfaatannya (masalah) secara sosial. Kolaborasi dengan lembaga zakat, BMT, dan koperasi syariah akan memperkuat jejaring pendanaan mikro dan distribusi ekonomi berbasis keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam maqashid syariah.

Sementara itu, dari sisi lingkungan, kebijakan ini dapat mendorong terwujudnya praktik ekonomi hijau (*green economy*) di masyarakat. STAIN Majene dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam setiap program pengabdian, misalnya dengan memperkenalkan teknologi pertanian ramah lingkungan, pelatihan daur ulang limbah rumah tangga, dan edukasi ekowisata berbasis masyarakat. Program ini akan memperkuat kesadaran ekologis sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi komunitas.

Dalam konteks lokal Kabupaten Majene yang rentan terhadap bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor, STAIN Majene juga dapat berperan sebagai agen mitigasi risiko lingkungan. Kegiatan pengabdian dapat diarahkan untuk mendampingi desa-desa rawan bencana dalam menyusun peta risiko, rencana kontinjensi, dan program pengurangan risiko berbasis masyarakat. Kolaborasi ini akan memperluas kontribusi kampus tidak hanya pada bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam perlindungan lingkungan.

Integrasi pendekatan sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi bukti bahwa kebijakan ini dirancang tidak dalam kerangka sektoral sempit, melainkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip *triple bottom line* yang menekankan pentingnya keberimbangan antara *people*, *planet*, dan *profit* dalam setiap program intervensi. Dalam hal ini, STAIN Majene memiliki peluang besar untuk mengembangkan model pengabdian masyarakat yang tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga relevan secara nasional sebagai *best practice* kampus keagamaan dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif transformasi kelembagaan, kebijakan pembentukan unit kemitraan eksternal di STAIN Majene bukan sekadar penambahan struktur organisasi, tetapi merupakan instrumen untuk mengubah paradigma hubungan antara kampus dan masyarakat. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan sebagai menara gading yang eksklusif, melainkan sebagai simpul kolaborasi yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penguatan fungsi kelembagaan perlu diiringi dengan reformasi manajemen berbasis kinerja dan sistem insentif yang mendukung keterlibatan aktif sivitas akademika.

Untuk menjamin efektivitas jangka panjang, kebijakan ini juga perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan strategis kampus, seperti Renstra STAIN Majene 2025–2029 dan dokumen akreditasi institusi. Integrasi ini penting agar kebijakan tidak bersifat jangka pendek atau *personal leadership-dependent*, melainkan menjadi bagian dari komitmen institusional yang berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian IKU Prodi dan Indikator Kinerja Utama Institusi (IKUI) perlu dilakukan agar orientasi pengabdian masyarakat berbasis mitra menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan.

Pendekatan implementasi kebijakan ini juga dapat menggunakan prinsip *adaptive management*, yaitu pengelolaan program yang fleksibel dan berbasis pada evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak bersifat kaku atau birokratis, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan mitra, perubahan regulasi, dan konteks

lokal. STAIN Majene dapat menyusun mekanisme review tahunan kemitraan, yang melibatkan mitra eksternal dalam evaluasi program dan penyusunan agenda kolaboratif tahun berikutnya.

Kebijakan ini juga harus memperhatikan penguatan kapasitas sumber daya manusia di internal kampus. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kemitraan eksternal perlu dibekali dengan kompetensi lintas disiplin, seperti fasilitasi komunitas, komunikasi lintas budaya, analisis ekonomi lokal, dan pendekatan partisipatif. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan tematik berbasis kompetensi perlu dirancang secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan nasional maupun mitra donor.

Lebih lanjut, kebijakan ini berpeluang untuk meningkatkan reputasi STAIN Majene di tingkat regional dan nasional. Jika praktik kolaborasi kampus-masyarakat ini berhasil didokumentasikan dengan baik dan dipublikasikan dalam forum akademik, jurnal pengabdian, maupun media massa, maka akan menjadi model best practice yang dapat direplikasi oleh kampus-kampus lain, khususnya di kawasan timur Indonesia. Hal ini akan memperkuat posisi STAIN Majene sebagai pelopor transformasi pengabdian berbasis komunitas Islam di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Kebijakan ini juga memiliki potensi dalam mendukung transformasi STAIN Majene menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu indikator kesiapan BLU adalah kemampuan lembaga untuk menjalin kerja sama dan menghasilkan layanan publik yang berdampak nyata. Melalui unit kemitraan eksternal, kampus dapat menunjukkan bahwa ia memiliki basis layanan pengabdian masyarakat yang produktif, profesional, dan didukung oleh sistem manajemen mutu. Dengan demikian, arah kebijakan ini juga memperkuat roadmap kelembagaan menuju tata kelola berbasis otonomi dan efisiensi.

Akhirnya, jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sinergis, maka STAIN Majene akan tumbuh sebagai center of community-based development yang berbasis nilai, pengetahuan, dan pemberdayaan. Inisiatif ini tidak hanya menjawab mandat tridharma perguruan tinggi, tetapi juga menunjukkan bahwa institusi keagamaan memiliki potensi besar dalam menjembatani transformasi sosial ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan belum didukung oleh data kuantitatif yang representatif, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Kajian ini belum mendalami aspek keberlanjutan pendanaan unit kelembagaan yang diusulkan, serta belum menjangkau seluruh potensi mitra strategis di Kabupaten Majene. Dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dan resistensi internal juga belum dianalisis secara komprehensif, sehingga dibutuhkan studi lanjutan untuk menguatkan dasar kebijakan ini. Kajian ini juga belum mengukur secara empiris dampak kegiatan pengabdian masyarakat terhadap indikator ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan atau pertumbuhan usaha mikro. Aspek pengaruh kebijakan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi pun belum dianalisis secara

mendalam. Oleh karena itu, pengembangan kerangka evaluasi berbasis outcome dan indikator terukur menjadi penting dalam studi selanjutnya.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kontribusi teoritis dalam bentuk pendekatan strategis penguatan peran pengabdian kepada masyarakat melalui pembentukan unit kelembagaan khusus yang berfokus pada kemitraan eksternal dan pemberdayaan ekonomi, sebuah model yang menggabungkan teori kemitraan strategis dan *governance* kolaboratif untuk konteks PTKIN, khususnya di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Majene. Kontribusi utama kajian ini terletak pada integrasi nilai-nilai Islam dalam desain kelembagaan pengabdian yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, dengan menekankan sinergi antara akademisi, pelaku usaha mikro, dan komunitas. Kebaruan kajian terletak pada fokus transformasi kelembagaan dan studi kasus spesifik di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Model yang diusulkan menjawab masalah klasik pengabdian masyarakat PTKIN seperti lemahnya dokumentasi dan kolaborasi, sekaligus memperkenalkan pendekatan partisipatif berbasis nilai lokal (sipakatau, assamaturu). Temuan ini tidak hanya relevan bagi STAIN Majene, tetapi juga menjadi rujukan bagi PTKIN lain dalam mendesain pengabdian yang berdampak nyata bagi masyarakat.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan rendahnya kolaborasi STAIN Majene dengan stakeholder ekonomi lokal maka dirumuskan tiga alternatif kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan peran pengabdian masyarakat STAIN Majene dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan **kebijakan institusional kolaborasi ekonomi lokal** dalam pengabdian masyarakat

Penerapan kebijakan institusional ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan arah strategis dalam membangun kolaborasi antara STAIN Majene dan stakeholder ekonomi lokal. Dalam kebijakan ini, kampus akan menyusun dokumen formal seperti Peraturan Ketua atau Surat Keputusan yang menetapkan prinsip-prinsip kemitraan, batas kewenangan, serta tanggung jawab sivitas akademika dalam menjalankan program pengabdian masyarakat berbasis ekonomi. Dokumen ini juga akan memuat ketentuan standar terkait penyusunan perjanjian kerjasama, pelaksanaan program, pelaporan kegiatan, dan pengukuran kinerja kolaboratif.

Mekanisme kerja kebijakan ini dimulai dari pembentukan tim penyusun regulasi internal yang melibatkan unsur P3M, pimpinan program studi, dan perwakilan dosen-mahasiswa. Setelah draf kebijakan disusun, dilaksanakan proses konsultasi dengan unit-unit terkait untuk harmonisasi. Selanjutnya, kebijakan disahkan oleh Ketua STAIN dan disosialisasikan melalui workshop dan forum akademik. Kebijakan ini juga

akan diintegrasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan penilaian kinerja dosen agar memiliki kekuatan implementatif.

Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan ini adalah meningkatnya kejelasan dan koordinasi program pengabdian yang melibatkan pihak eksternal. Kegiatan PkM menjadi lebih terarah, terdokumentasi, dan selaras dengan rencana strategis institusi. Selain itu, dosen dan mahasiswa memiliki dasar hukum untuk menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha lokal, tanpa khawatir akan ketidaksinkronan administratif. Namun, kebijakan ini juga berisiko tidak berjalan efektif jika hanya berhenti pada tataran dokumen formal tanpa pengawasan implementasi.

Sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan ini relatif kecil, yakni meliputi waktu dan keahlian tim penyusun, dukungan administratif kampus, serta proses legalisasi. Anggaran dapat difokuskan pada kegiatan penyusunan, lokakarya sosialisasi, dan monitoring awal. Tidak diperlukan investasi fisik atau struktur baru, sehingga alternatif ini efisien dari sisi biaya.

Tantangan utama dari kebijakan ini adalah memastikan perubahan budaya kerja sivitas akademika, terutama dalam hal keterlibatan aktif pada program kolaboratif yang sebelumnya bersifat sukarela. Namun, kebijakan ini memiliki peluang besar karena dapat dimanfaatkan untuk integrasi kegiatan pengabdian dalam indikator kinerja institusi, meningkatkan nilai akreditasi, dan memperkuat peran kampus dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain memberikan kepastian hukum, kebijakan institusional juga akan menjadi instrumen kontrol dan akuntabilitas pelaksanaan program pengabdian. Dokumen kebijakan yang disusun harus memuat klausul tanggung jawab, standar mutu kegiatan, dan sistem pelaporan berbasis hasil. Hal ini akan memperkuat transparansi dan membantu pimpinan dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit yang terlibat dalam program kemitraan eksternal.

2. Mendirikan unit khusus kemitraan eksternal dan pemberdayaan ekonomi di bawah P3M STAIN Majene

Alternatif kebijakan ini menawarkan solusi kelembagaan yang berfokus pada pendirian unit struktural di bawah koordinasi P3M, yang secara khusus bertugas merancang, mengelola, dan mengevaluasi program kemitraan eksternal untuk pengabdian masyarakat. Unit ini akan menjadi motor penggerak utama dalam menjembatani komunikasi antara STAIN Majene dan berbagai stakeholder ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi, lembaga zakat, dan Dinas Koperasi Daerah. Fungsi utamanya mencakup pemetaan potensi mitra, penyusunan program kolaboratif, monitoring dampak kegiatan, serta pengelolaan administrasi kemitraan.

Secara teknis, unit ini akan memiliki struktur fungsional minimal yang terdiri atas koordinator, staf administrasi, dan tenaga lapangan. Mereka bertanggung jawab melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun rencana kegiatan bersama mitra, memfasilitasi keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta menyusun laporan evaluatif secara periodik. Unit ini akan dilengkapi dengan sistem informasi digital untuk mendukung transparansi, koordinasi lintas prodi, dan pengelolaan basis data kemitraan. Dampak

positif dari kebijakan ini adalah meningkatnya efektivitas koordinasi program pengabdian dan terciptanya sistem kelembagaan yang mampu bekerja secara lintas sektor. Program yang dirancang akan lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada aktor individu, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Unit ini juga berpeluang menjadi pusat unggulan kolaboratif yang dapat mengakses sumber pendanaan eksternal dari CSR atau hibah pemberdayaan.

Namun, kebijakan ini menuntut alokasi sumber daya yang cukup besar, baik dari sisi pembiayaan, SDM, maupun infrastruktur pendukung. Ruang kerja, perangkat TIK, dan pelatihan staf menjadi kebutuhan awal yang harus dipenuhi. Selain itu, perlu adanya regulasi turunan yang mengatur hubungan antara unit ini dengan struktur kampus lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Tantangan terbesar dari kebijakan ini adalah proses birokratis dalam pembentukan unit baru dan kemungkinan resistensi terhadap perubahan struktural. Namun, peluangnya juga besar, karena keberadaan unit ini dapat menjawab kebutuhan strategis kelembagaan STAIN Majene dalam memperkuat pengabdian masyarakat sebagai pilar penting Tri Dharma, sekaligus menjadikannya institusi yang adaptif dan responsif terhadap isu ekonomi lokal. Unit ini berpotensi menjadi ruang pembelajaran lintas disiplin karena keterlibatan banyak program studi dalam program kolaboratif. Misalnya, program studi Hukum Keluarga Islam dapat menyusun modul penyuluhan hukum untuk pelaku UMKM, sementara Prodi Ekonomi Syariah dapat mendampingi koperasi syariah, dan Prodi Komunikasi dapat memfasilitasi strategi pemasaran digital. Kolaborasi lintas prodi ini akan memperkaya pendekatan pemberdayaan masyarakat.

3. Mengembangkan program pelatihan dan insentif dosen-mahasiswa untuk menjalin kemitraan strategis

Alternatif kebijakan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan kapasitas dosen serta mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi melalui pendekatan penguatan sumber daya manusia. Fokus utamanya adalah penyelenggaraan pelatihan tematik dan pemberian insentif berbasis kinerja untuk mereka yang aktif menjalin kemitraan strategis dengan pelaku ekonomi lokal. Tema pelatihan meliputi manajemen kewirausahaan komunitas, pendekatan ekonomi syariah, digitalisasi usaha lokal, serta teknik fasilitasi partisipatif.

Program ini akan dijalankan melalui kerja sama antara P3M, unit pelatihan internal kampus, dan mitra eksternal. Pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk workshop, bimbingan teknis, hingga pelatihan intensif lapangan. Insentif yang ditawarkan bersifat finansial dan non-finansial, seperti pemberian SK kegiatan, sertifikat penghargaan, perolehan angka kredit pengabdian, serta peluang publikasi hasil pengabdian. Insentif ini dirancang untuk mendorong partisipasi dan kompetisi sehat di antara sivitas akademika.

Dampak positif dari kebijakan ini adalah meningkatnya kompetensi dan motivasi dosen serta mahasiswa untuk berperan aktif dalam pengabdian masyarakat yang berdampak. Selain itu, program ini akan membentuk budaya baru di lingkungan kampus yang menempatkan pengabdian sebagai bagian penting dari proses akademik. Dengan

pelatihan yang tepat sasaran, kegiatan kolaboratif akan lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mitra di lapangan.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada kesinambungan anggaran dan relevansi materi pelatihan. Bila tidak didesain dengan baik, pelatihan berisiko menjadi seremonial dan insentif dapat menjadi beban anggaran yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem evaluasi dan monitoring yang ketat untuk memastikan hasil pelatihan benar-benar diterapkan dalam program nyata.

Meskipun pelaksanaannya lebih fleksibel dibanding dua alternatif sebelumnya, kebijakan ini menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan, pengawasan mutu, dan integrasi dengan program tridharma lainnya. Namun, peluang untuk menumbuhkan SDM pengabdian yang profesional dan adaptif sangat terbuka lebar, terutama jika pelatihan ini menjadi bagian dari strategi pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam jangka panjang.

Program pelatihan ini dapat dirancang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga pendekatan praktik langsung melalui *community-based learning*. Misalnya, peserta pelatihan tidak hanya mengikuti materi di ruang kelas, tetapi juga diterjunkan ke lapangan untuk mengimplementasikan materi dengan bimbingan mentor dari kampus dan mitra masyarakat. Model ini akan meningkatkan keterampilan kontekstual dan sensitivitas sosial.

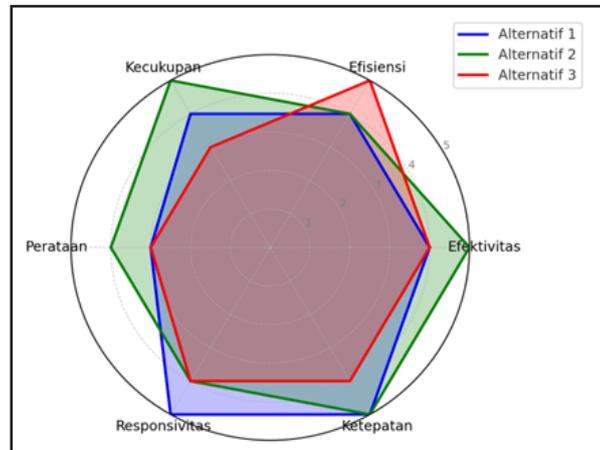
Materi pelatihan perlu terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi terbaru. Beberapa topik pelatihan yang relevan antara lain: pemasaran digital untuk UMKM, manajemen risiko usaha mikro, strategi branding produk lokal, hingga pemanfaatan keuangan mikro syariah untuk komunitas. Keterlibatan praktisi dan alumni yang telah sukses dalam dunia usaha lokal juga dapat menjadi aset pelatihan.

Pada alternatif kebijakan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan pemilihan alternatif kebijakan terbaik dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap alternatif kebijakan secara kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan Teori William N. Dunn, yang mengevaluasi pilihan kebijakan dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas, yakni sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.
2. Efisiensi, yakni perbandingan antara manfaat yang dihasilkan dengan sumber daya (biaya, waktu, tenaga) yang digunakan.
3. Kecukupan, yakni kemampuan suatu kebijakan dalam mengatasi skala atau cakupan masalah secara menyeluruh.
4. Perataan, yakni keadilan distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara kelompok masyarakat yang terkena dampak.
5. Responsivitas, yakni seberapa baik kebijakan menjawab kebutuhan, nilai, atau tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan.

6. Ketepatan, yakni sejauh mana kebijakan relevan dengan akar masalah dan konteks sosial-politik saat ini.

Berikut diagram radar yang menggambarkan evaluasi ketiga alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria dari Teori William N. Dunn:



Gambar 2. Diagram Radar Evaluasi Alternatif Kebijakan

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat diketahui nilai hasil evaluasi untuk masing-masing alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan institusional kolaborasi ekonomi lokal dalam pengabdian masyarakat, total nilai 25.
2. Mendirikan unit khusus kemitraan eksternal dan pemberdayaan ekonomi di bawah P3M STAIN Majene, total nilai 27.
3. Mengembangkan program pelatihan dan insentif dosen-mahasiswa untuk menjalin kemitraan strategis, total nilai 23.

Adanya hasil evaluasi dari tiga alternatif kebijakan di atas, didapatkan opsi kebijakan yang dinilai paling komprehensif dan strategis dalam menjawab persoalan rendahnya kolaborasi dengan stakeholder ekonomi lokal yaitu mendirikan unit khusus kemitraan eksternal dan pemberdayaan ekonomi di bawah P3M STAIN Majene.

Adapun tahapan implementasi kebijakan pendirian Unit Khusus Kemitraan Eksternal dan Pemberdayaan Ekonomi di STAIN Majene sebagai berikut:

1. Landasan hukum dan kelembagaan

Implementasi kebijakan ini diawali dengan membentuk dasar hukum kelembagaan melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua STAIN Majene tentang pendirian Unit Khusus Kemitraan Eksternal dan Pemberdayaan Ekonomi. Surat Keputusan ini memberikan legitimasi administratif atas eksistensi unit serta memperjelas kedudukannya dalam struktur organisasi kampus. Dalam dokumen tersebut dicantumkan struktur organisasi unit, uraian tugas dan fungsi, mekanisme kerja, serta alur pelaporan. Unit ini ditempatkan secara struktural di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), sehingga menjadi bagian integral dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

2. Struktur organisasi dan sumber daya manusia

Struktur organisasi unit dirancang ramping dan operasional. Koordinator unit dipilih dari kalangan dosen yang memiliki rekam jejak kuat dalam bidang pengabdian masyarakat. Ia didukung oleh staf administrasi dan tenaga lapangan (field officer), yang dapat melibatkan mahasiswa dalam bentuk magang atau relawan. Personel ini akan menjalankan fungsi koordinasi kemitraan, komunikasi eksternal, serta operasional program di lapangan. Kelebihan dari struktur ini adalah fleksibilitas dan kapasitas lintas program studi untuk menjalin relasi kolaboratif dengan komunitas lokal seperti UMKM, koperasi syariah, BUMDes, dan lembaga zakat.

3. Perencanaan strategis dan operasionalisasi program

Setelah struktur terbentuk, unit menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perencanaan tersebut berbasis pada hasil pemetaan potensi ekonomi lokal dan kebutuhan komunitas, yang dilakukan melalui survei atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tokoh masyarakat dan pelaku ekonomi. Program kerja yang dirancang mencakup pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran digital, literasi keuangan syariah, dan pengembangan usaha berbasis komunitas. Program dirancang kolaboratif dan kontekstual, menyesuaikan dengan karakteristik mitra dan kapasitas internal kampus.

4. Kemitraan dan dokumentasi kolaborasi

Tahap berikutnya adalah menjalin kemitraan formal dengan pihak eksternal melalui penandatanganan dokumen kerja sama seperti Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Unit bertugas menyusun dokumen ini secara sistematis, serta memastikan keberlanjutan hubungan kemitraan melalui program yang terukur. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dilakukan secara menyeluruh untuk kepentingan akuntabilitas, evaluasi, dan publikasi. Kegiatan pengabdian selalu melibatkan dosen dan mahasiswa dalam pendekatan *community-based learning* sebagai bagian dari transformasi pembelajaran kontekstual.

5. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan secara berkala berdasarkan indikator output dan outcome yang telah ditentukan sejak awal. Evaluasi mencakup efektivitas program, dampak terhadap mitra, dan kualitas pelibatan sivitas akademika. Hasil monev dilaporkan secara internal kepada P3M dan pimpinan STAIN Majene, serta dirangkum dalam laporan publik tahunan yang memuat capaian, kendala, dan rekomendasi kebijakan. Digitalisasi sistem pelaporan menjadi fokus utama, agar pelacakan program, mitra, dan progres kegiatan dapat dilakukan secara *real time*.

6. Pendanaan dan dukungan fasilitas

Pada tahap awal, pendanaan diambil dari alokasi anggaran P3M atau program strategis kampus. Selanjutnya, unit didorong untuk mengakses sumber pembiayaan eksternal seperti hibah pengabdian dari Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, program CSR, dan dana mitra. Sarana dan prasarana dasar seperti ruang kerja, komputer, internet,

dan sistem informasi kemitraan menjadi prasyarat penting yang perlu disiapkan oleh institusi agar mendukung operasional unit secara optimal.

7. Digitalisasi dan inovasi sistem informasi

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, unit mengembangkan platform digital berupa website atau aplikasi mobile. Platform ini berfungsi sebagai pusat data kemitraan, penyimpanan dokumen, jadwal kegiatan, profil mitra, dan laporan kinerja. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem informasi akademik, sehingga aktivitas mahasiswa dalam program kemitraan dapat diakui secara formal melalui konversi SKS atau pengakuan kegiatan non-kurikuler. Inovasi digital ini mendukung akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi sivitas kampus secara luas.

8. Kontribusi terhadap akreditasi dan mutu institusional

Unit ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi peningkatan mutu institusi, khususnya dalam pelaksanaan tridharma pengabdian kepada masyarakat. Adanya dokumentasi kegiatan yang sistematis, pelibatan mitra strategis, dan pencapaian dampak sosial-ekonomi akan menjadi nilai tambah dalam proses akreditasi BAN-PT. Lebih jauh, praktik baik dari unit ini dapat menjadi model bagi pengembangan pengabdian masyarakat di lingkungan PTKIN lainnya.

9. Strategi pelibatan aktor internal dan eksternal

Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada sinergi lintas unit dan aktor. Oleh karena itu, proses implementasi dirancang partisipatif, melibatkan dosen, mahasiswa, ketua prodi, mitra lokal, dan tokoh masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Pelibatan ini akan membangun rasa kepemilikan terhadap program, memperkuat dukungan institusional, dan memastikan program berjalan dengan basis kebutuhan nyata masyarakat.

10. Arah pengembangan

Pendirian Unit Khusus Kemitraan Eksternal dan Pemberdayaan Ekonomi bukan hanya menjawab kelemahan struktural dalam pengabdian masyarakat, tetapi juga menjadi strategi penguatan kapasitas institusi dalam pembangunan lokal. Ke depan, unit ini diarahkan menjadi pusat unggulan kampus dalam kolaborasi sosial-ekonomi berbasis nilai keislaman dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi yang terstruktur dan berbasis bukti akan menjadikan STAIN Majene sebagai model kampus berbasis pengabdian yang responsif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk operasionalisasi unit khusus kemitraan eksternal, STAIN Majene dapat mengembangkan program kolaboratif pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai Islam yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Majene. Beberapa model yang dapat diadopsi berikut ini.

Tabel 2. Program PkM STAIN Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

No	Program	Target	Mitra	Waktu
1	Pendampingan UMKM Syariah	50 pelaku UMKM (perajin, nelayan, petani)	BMT Syariah, Dinas Koperasi & UMKM, LPPOM MUI	Tahunan

2	Zakat Produktif untuk Usaha Mikro	20 penerima manfaat (mustahik)	BAZNAS Majene, LAZ lokal	Semester
3	Inkubator Bisnis Syariah Mahasiswa	15 tim mahasiswa	HIPMI, Koperasi Syariah	Tahunan
4	Jejaring Masjidpreneur	10 takmir masjid	DKM Masjid, Dinas Perdagangan	Semester
5	Pelatihan Keuangan Syariah untuk Perempuan	30 orang (ibu rumah tangga)	PKK Desa, Komunitas Muslimah	Triwulan

Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, pendirian unit khusus ini akan menjadi lompatan besar dalam mengatasi kelemahan kelembagaan pengabdian masyarakat yang selama ini terjadi. Selain menciptakan koordinasi lintas prodi, unit ini juga akan memperluas jejaring kolaborasi dan memperkuat posisi STAIN Majene sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Implementasi kebijakan ini secara langsung menjawab permasalahan rendahnya kolaborasi, tidak adanya prosedur formal, dan ketiadaan struktur pengelola yang khusus, sehingga menjadi solusi strategis yang tepat dan aplikatif untuk mendorong transformasi tridharma perguruan tinggi ke arah yang lebih berdampak dan kontekstual.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, unit ini dapat berperan sebagai *clearing house* untuk seluruh kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kemitraan. Artinya, sebelum suatu program dijalankan, harus melalui verifikasi dan koordinasi dengan unit ini untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan mitra dan arah strategis kampus. Dengan demikian, unit tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengarah dan pengendali mutu kegiatan PkM. Praktik ini akan membantu menciptakan keselarasan lintas program studi dan menghindari tumpang tindih antar kegiatan yang bersifat sektoral dan fragmentatif.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, kolaborasi lintas unit di kampus, dan dukungan dari mitra eksternal. Oleh karena itu, proses perencanaan dan pelaksanaan harus melibatkan pendekatan partisipatif sejak awal, termasuk diskusi dengan dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan pelaku ekonomi lokal. Dengan membangun rasa memiliki terhadap kebijakan ini, implementasi akan berjalan lebih efektif, dan unit ini tidak hanya menjadi struktur formal, tetapi juga wadah transformasi nyata dalam memperkuat kontribusi STAIN Majene terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Peningkatan peran pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene dalam pemberdayaan ekonomi lokal merupakan kebutuhan mendesak yang menuntut pembenahan struktural, sistemik, dan strategis. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah lemahnya kolaborasi institusional dengan stakeholder ekonomi lokal yang disebabkan oleh tidak adanya kebijakan formal, prosedur operasional standar, dan unit kelembagaan khusus yang menangani kemitraan eksternal. Kondisi ini menyebabkan program pengabdian yang dilak-

sanakan cenderung sporadis, tidak terdokumentasi dengan baik, dan kurang berdampak terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Kajian ini merekomendasikan pembentukan Unit Khusus Kemitraan Eksternal dan Pemberdayaan Ekonomi di bawah koordinasi P3M sebagai alternatif kebijakan yang paling strategis. Unit ini tidak hanya menjadi pusat koordinasi kemitraan, tetapi juga aktor utama dalam pengembangan sistem informasi digital, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, dan penguatan peran dosen-mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kolaboratif. Kebijakan ini akan berdampak pada tiga aspek utama: sosial, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penguatan modal sosial; ekonomi, melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro berbasis ekonomi syariah; dan lingkungan, melalui integrasi prinsip keberlanjutan dalam program pengabdian. Dalam jangka panjang, kebijakan ini mendukung transformasi kelembagaan STAIN Majene menjadi kampus berbasis pengabdian yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan lokal.

Kesuksesan implementasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh dukungan penuh pimpinan, keterlibatan aktif sivitas akademika, ketersediaan anggaran, serta kemitraan strategis yang berkelanjutan. Dengan membangun kelembagaan yang kuat dan kolaboratif, STAIN Majene memiliki potensi besar menjadi model PTKIN yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Dalam rangka memperkuat kontribusi STAIN Majene terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan peran pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika, direkomendasikan kepada Ketua STAIN Majene untuk mengeluarkan kebijakan institusional berupa pembentukan Unit Khusus Kemitraan Eksternal dan Pemberdayaan Ekonomi. Unit ini berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan memiliki mandat strategis sebagai berikut:

1. Merancang model kemitraan yang sistematis dan berbasis kebutuhan lokal, dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, BUMDes, serta komunitas ekonomi lainnya di Kabupaten Majene;
2. Mengelola pelaksanaan kerja sama eksternal secara terstruktur dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama, dan monitoring evaluasi program kolaboratif;
3. Memperluas jaringan kolaborasi strategis STAIN Majene dengan stakeholder ekonomi lokal, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, agar selaras dengan agenda pemberdayaan ekonomi komunitas dan program prioritas daerah.

Pembentukan unit ini diharapkan dapat menjadi instrumen kelembagaan yang menjembatani sinergi antara STAIN Majene dan masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak bersifat sporadis, tetapi terarah, terdokumentasi, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Amalia, R., & Lestari, E. (2020). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 112-124.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- BAN-PT. (2023). *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9 Kriteria*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Brinkerhoff, J. M. (2002). Government-Nonprofit Partnership: A Defining Framework. *Public Administration and Development*, 22(1), 19-30.
- Ismail, M., Sahlan, M., & Karim, R. (2021). Strategi Pengabdian Masyarakat Berbasis Kebutuhan Lokal. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 2(1), 35-45.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Mendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi*.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2015). *Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Morgan, P. (2006). *The Concept of Capacity*. European Centre for Development Policy Management.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment Theory, Research, and Application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569-579.
- Pratama, I. R., & Wijaya, H. (2018). Penyusunan SOP sebagai Upaya Penguatan Tata Kelola Program Pengabdian. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(1), 44–53.
- Putra, H., Lestari, D., & Wulandari, N. (2021). Penguatan Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Pembangunan Daerah*, 3(2), 77-91.
- Rahman, T., & Surya, Y. (2022). Transformasi Budaya Organisasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi Islam*, 6(1), 88–102.
- Setyawati, L. (2020). Keterkaitan antara Penelitian dan Pengabdian: Tinjauan Konseptual. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(3), 221–230.
- Siregar, D., & Hamid, A. (2021). Insentif Akademik untuk Peningkatan Partisipasi Dosen dalam Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan*, 4(2), 114–126.
- Sukarno, A., & Putri, M. (2022). Integrasi Pengabdian dalam Penilaian Kinerja Dosen. *Jurnal Evaluasi Kinerja Akademik*, 5(1), 29–40.
- Suryana, T., & Santoso, B. (2019). Tantangan Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Pengabdian. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 10-20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- Wibowo, H., & Cahyono, A. (2021). Tantangan dan Strategi Kolaborasi Akademik. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan Tinggi*, 5(2), 87–98.
- Wiryanto, A. (2017). Penguatan SOP dalam Pengelolaan Program Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(3), 145–155.
- Yusuf, M., & Rachmawati, A. (2020). Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 55-64.

LAMPIRAN

Tabel Urgency, Seriousness, Growth

Identifikasi Masalah	Analisis USG	Penjelasan	Peringkat
Program Pengabdian Masyarakat Belum Fokus Pada Isu Ekonomi Lokal	Urgency = 4 Seriousness = 4 Growth = 3	Masalah ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pengabdian yang tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi lokal menyebabkan rendahnya efektivitas program PkM. Meskipun kegiatan pengabdian berjalan, dampaknya menjadi tidak signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat karena tidak menasar sektor-sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, atau perdagangan kecil yang dominan di Majene. Jika tidak segera diorientasikan ulang, maka PkM akan kehilangan relevansi, dan masyarakat tidak merasakan manfaat konkret dari keberadaan kampus. Fokus tematik berbasis potensi dan masalah lokal perlu segera dibangun agar PkM menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang strategis.	III
Rendahnya Kolaborasi dengan Stakeholder Ekonomi Lokal	Urgency = 5 Seriousness = 5 Growth = 4	Masalah ini merupakan titik lemah paling kritis yang menghambat terciptanya pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak luas. Tanpa kemitraan yang kuat dengan pelaku ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi, komunitas petani, dan dinas terkait, maka program PkM hanya akan menjadi agenda akademik yang tidak terintegrasi dengan realitas sosial-ekonomi. Kolaborasi tidak hanya soal pelibatan mitra, tetapi juga menyangkut proses perencanaan bersama, pelaksanaan, hingga evaluasi. Lemahnya kolaborasi menandakan perlunya kebijakan institusional yang secara eksplisit mendorong dan memfasilitasi jejaring strategis. Inilah masalah yang paling mendesak untuk ditangani karena menyangkut fondasi sistemik dari keberhasilan PkM.	I
Kurangnya Kompetensi Dosen dan Mahasiswa Dalam Pemberdayaan Ekonomi	Urgency = 4 Seriousness = 5 Growth = 4	Masalah ini berakar pada keterbatasan pelatihan, pengalaman lapangan, serta integrasi kurikulum yang mendorong aplikasi ilmu secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika dosen dan mahasiswa belum memiliki kapasitas dalam hal fasilitasi komunitas, literasi keuangan, kewirausahaan sosial, dan pengembangan potensi lokal, maka pelaksanaan PkM menjadi normatif dan kurang adaptif terhadap kebutuhan mitra. Jika tidak ada intervensi peningkatan kapasitas, maka akan muncul ketergantungan pada pendekatan instruksional satu arah. Meski dampaknya belum bersifat destruktif, namun dalam jangka panjang masalah ini berpotensi menghambat pengembangan ekosistem akademik yang produktif dan kontributif secara sosial.	II
Model Pengabdian Masyarakat Masih Bersifat Konvensional Berupa Pelatihan Satu Arah Tanpa Integrasi Teknologi	Urgency = 3 Seriousness = 3 Growth = 3	Model pelatihan satu arah tanpa partisipasi aktif dari mitra masyarakat menjadikan program PkM cenderung tidak membekas atau berkelanjutan. Minimnya pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi keuangan digital, pemasaran daring, atau manajemen berbasis data, membuat pendekatan pengabdian menjadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun masalah ini tidak se-urgent isu kolaborasi atau fokus tematik, tetap diperlukan pembaruan metode agar lebih partisipatif, berbasis solusi nyata, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan perluasan jangkauan dampak. Transformasi model PkM merupakan bagian dari agenda jangka menengah yang perlu dirancang secara sistemik dan bertahap.	IV

Tabel Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Alternatif Kebijakan	Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn (1-5)						Total Skor
	Efektivi- vitas	Efisi- ensi	Kecu- kupan	Pera- taan	Respon- sivitas	Kete- patan	
Menyusun dan menetapkan kebijakan institusional kolaborasi ekonomi lokal dalam pengabdian masyarakat	4	4	4	3	5	5	25
Mendirikan unit khusus kemitraan eksternal dan pemberdayaan ekonomi di bawah P3M STAIN Majene	5	4	5	4	4	5	27
Mengembangkan program pelatihan dan insentif dosen-mahasiswa untuk menjalin kemitraan strategis	4	5	3	3	4	4	23